

***EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BPRS TERHADAP HASIL PERTANIAN NASABAH DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA***

***Wahyu Nur Utami***

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

[wahyunurutami5@gmail.com](mailto:wahyunurutami5@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Prosedur pembiayaan agribisnis, 2) Peluang dan tantangan pembiayaan agribisnis, dan 3) Efektifitas pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi, sedangkan untuk pemeriksaan data menggunakan *cross check*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, khususnya PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdiri dari 3 tahap yaitu a) tahap pengajuan pembiayaan yang terdiri dari pengisian form pembiayaan oleh nasabah, BI *Checking*, dan survey lapangan, b) tahap pencairan dana yang dilaksanakan bersamaan dengan akad, c) tahap pengembalian pembiayaan oleh nasabah. 2) Peluang sektor agribisnis yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan suatu daerah, khususnya kebutuhan pangan di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan hambatan-hambatannya yaitu a) sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko, b) lamanya waktu usaha di bidang agribisnis, c) sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar, d) orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit. 3) Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif, namun jika dilihat dari hasil distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut dinilai kurang efektif.

Kata kunci: Prosedur Pembiayaan Agribisnis BPRS, Peluang dan Hambatan, Efektivitas Pembiayaan Agribisnis

***EFFECTIVNESS OF AGRIBUSINESS FINANCING OF BPRS ON CUSTOMER'S AGRICULTURAL PRODUCTS IN BANTUL DISTRICT, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA)***

**Abstract:** The purpose of this research is to know: 1) Agribusiness financing procedure, 2) Opportunities and challenges of agribusiness financing, and 3) Effectiveness of agribusiness financing of BPRS on customer's agricultural product in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. This research is a qualitative research supported by quantitative data. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Analytical technique used to test the validity of data is a triangulation technique, as for the verification of data using *cross check*. The results of this study indicate that: 1) BPRS agribusiness financing procedure in Bantul Regency, especially PT BPRS Bangun Drajat Warga and PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera consists of 3 stages, namely a) stage of financing submission consisting of completion of financing form by customer, BI *Checking*, and field survey, b) disbursement stage of fund held simultaneously with the contract, c) return stage of financing by the customer. 2) Agribusiness sector opportunity that can meet the food needs of a region, especially food needs in Bantul District, Special Region of Yogyakarta. While the barriers are a) the agribusiness sector is a risky business sector, b) the length of time of business in the field of agribusiness, c) agribusiness sector requires a large input costs, d) people working in the agribusiness sector is getting less. 3) Agribusiness financing on the results of customers' business PT BPRS Bangun Drajat Residents and PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

in 2017 can be said to be effective, however when looked from the results of the distribution of both BPRS financing is considered less effective.

Keywords: BPRS Agribusiness Financing Procedures, Opportunities and Constraints, Effectiveness of Agribusiness Financing

## PENDAHULUAN (CTRL+ALT+H)

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan strategis dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada tahun 2015, BPS mencatat luas lahan pertanian di daerah ini sebesar 15.225 Ha, atau sebesar 27,47% dari luas pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2016 menyumbang sebesar Rp11.456.172,97 atau sebesar 10,41% terhadap Produk Domestik Bruto Regional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2016, PDRB sektor pertanian di Bantul mengalami penurunan sebesar 0.23% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik daerah Bantul mengonfirmasi bahwa hal ini disebabkan oleh bergantinya lahan pertanian, lambatnya kenaikan produk, dan keterbatasan modal petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada masalah keterbatasan modal petani. Pada dasarnya keterbatasan modal petani masih ini masih menjadi permasalahan dalam sektor pertanian. Moebyarto dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Pertanian (1986)* dan Moehar Daniel dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Pertanian (2002)* menyebutkan bahwa keterbatasan modal petani menjadi salah satu permasalahan dalam ekonomi pertanian. Melihat kondisi tersebut, petani khususnya daerah Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian khusus oleh daerah setempat, salah satunya yaitu perlu adanya pembiayaan yang berasal dari perbankan daerah. Jika merujuk pada permasalahan yang ada dalam sektor pertanian tersebut, prinsip non riba atau bagi hasil dari perbankan syariah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian. Terdapat dua perbankan syariah daerah yang menawarkan pembiayaan agribisnis kepada petani itu sendiri yaitu PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Melalui pembiayaan agribisnis oleh kedua BPRS tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan agribisnis serta peluang dan hambatan pembiayaan. Selain itu untuk mengetahui efektivitas pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data-data kuantitatif. Subjek penelitian yang diambil yaitu karyawan dan nasabah agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu *data crosscek* atau pengecekan data antara hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembiayaan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut hasil dan pembahasan yang dapat dituliskan:

### 1. Prosedur Pembiayaan Agribisnis PT BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Prosedur pembiayaan merupakan segala sesuatu yang harus dijalankan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan dari awal pengajuan hingga pelunasan pembiayaan. Secara ringkas, prosedur pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dibagi menjadi 3 yaitu pengajuan pembiayaan, pencairan dana, dan pengembalian dana.

Tahap pengajuan pembiayaan pada PT BPRS Madina Mandiri sejahtera terdiri dari nasabah mengisi form pembiayaan di BPRS, BI *Checking*, dan survey lapangan. Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga tahap pengajuan pembiayaan agribisnis terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pengecekan berkas administrasi calon nasabah, dan survey lapangan. Pada tahap pengajuan pembiayaan agribisnis ini terdapat prosedur yang ditetapkan oleh pihak BPRS untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Seluruh anggota yang hendak mengajukan pembiayaan agribisnis di BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan BPRS Bangun Drajat Warga diharuskan untuk memenuhi segala prosedur yang diberlakukan BPRS seperti diawali dengan pengisian formulir pembiayaan dan selanjutnya melengkapi administrasi. Selain itu, sebagai analisis penyaluran pembiayaan, pihak BPRS melakukan BI *Checking*, survey lapangan, dan analisis keabsahan data. Hal ini tentunya dapat membantu pihak bank dalam meningkatkan sistem keamanannya yaitu dengan menyalurkan pembiayaan agribisnis kepada nasabah yang tepat. Sebagian besar nasabah yang menggunakan pembiayaan agribisnis mengatakan bahwa prosedur pembiayaan BPRS mudah dan prosesnya cepat.

Sebelum tahap pencairan dana, pengajuan pembiayaan agribisnis PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat Warga akan dianalisis kelayakan untuk mendapat pembiayaan. Proses kelayakan ini dilakukan setelah survey lapangan, setelah itu bagian *account manager* mengajukan memorandum analisis pembiayaan kepada JM marketing atau director marketing, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju. Setelah proses analisis memorandum pembiayaan disetujui oleh komite, maka proses akad dan pencairan dana dapat dilakukan. Proses pencairan pembiayaan dapat diusahakan BPRS dalam waktu yang sesingkat mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS, waktu yang diperlukan untuk pencairan dana pembiayaan adalah satu sampai tujuh hari dari pengajuan pembiayaan. Namun hasil lapangan menemukan rata-rata waktu pencairan dana pembiayaan adalah antara satu sampai lima hari setelah pengajuan pembiayaan. Pada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan sebelumnya, pencairan dana lebih cepat yaitu bisa 1 hari cair karena data administrasi yang sudah ada cukup untuk diperbaharui saja.

Pada tahap pengembalian pembiayaan agribisnis, jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BPRS dengan nasabah pada waktu akad. Uniknya pada pembiayaan agribisnis, angsuran pembiayaan bisa menggunakan sistem sebrakan yaitu jangka waktu 4 s.d 6 bulan dengan membayar bagi hasil pada bulan ke 1 s.d bulan ke 3 atau 5, kemudian bulan terakhir membayar bagi hasil dan juga pinjaman pokoknya. Menurut nasabah, dengan adanya sistem sebrakan tersebut dapat meringankan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Karena telah diketahui sebagian besar usaha di sektor agribisnis merupakan usaha musiman yang tidak setiap bulan dapat menuai hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera maupun BPRS Bangun Drajat warga, sampai saat ini tidak ada nasabah agribisnis yang mengalami permasalahan dalam pengembalian pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sigit Junaedi, S.E

selaku GM Marketing PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan Bapak Wakhid Hasyim, S.E selaku kepala bagian administrasi PT Bangun Drajat Warga. Melalui adanya prosedur penyaluran pembiayaan agribisnis yang ketat, kedua BPRS tersebut menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agribisnis yang tepat. Salah satunya yaitu melakukan mitigasi terhadap nasabah agribisnis yaitu dengan cara melihat pengalaman nasabah di usaha agribisnisnya, kebanyakan nasabah yang dibiayai yaitu nasabah-nasabah yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selain mitigasi, ada pula upaya memonitoring usaha dan keuangan nasabah dengan melakukan pembinaan keuangan dengan cara silaturahmi. Melalui silaturahmi ini, pihak bank dapat mengetahui dan membantu permasalahan yang di hadapi oleh nasabah. Selain itu untuk menambah sistem keamanan BPRS, kedua BPRS tersebut memilih nasabah agribisnis yang tidak hanya memiliki sumber pendapatan dari satu sektor, hal ini bertujuan untuk memback-up pengembalian pembiayaan ketika nasabah mengalami kerugian pada usahanya. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dapat dikatakan strategi yang digunakan oleh BPRS Madina Mandiri Syariah dan BPRS Bangun Drajat Warga sudah tepat dalam mengontrol nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

## **2. Peluang dan Hambatan Pembiayaan Agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10,41% PDRB pada tahun 2016 berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Melalui sektor agribisnis ini, kebutuhan pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Sebagai bentuk dari penangkapan peluang agribisnis di Kabupaten Bantul, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan PT BPRS Bangun Drajat warga melakukan beberapa strategi pemasaran. Strategi pemasaran tersebut dilakukan dengan cara promosi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Promosi secara langsung diantaranya yaitu promosi yang dilakukan oleh AO atau bagian marketing bank kepada masyarakat, promosi yang dilakukan nasabah *existing* kepada teman bisnisnya, dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok agribisnis. Promosi secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media sosial, salah satunya yaitu facebook, instagram, whatsapp, maupun web site.

Selain peluang dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku agribisnis, pihak bank mendapati hambatan-hambatan dalam pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

### **a. Sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko**

Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh cuaca maupun iklim. Seringkali pelaku usaha mengalami gagal panen ketika kondisi cuaca dan iklim tidak bagus. Hal tersebut dialami oleh beberapa nasabah PT Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang bermatapencaharian sebagai petani padi dan sayuran, petani melon, dan peternak ayam. Resiko dalam sektor agribisnis, khususnya di bidang pertanian sudah sejak dahulu kala. Memang masalah yang dihadapi oleh petani adalah cuaca dan iklim itu sendiri. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, BPRS sebagai pemilik modal mempunyai strategi penyaluran pembiayaan bagi nasabah agribisnis yang dilakukan pada awal analisis pemberian modal. BPRS membiayai nasabah agribisnis yang mempunyai sumber pendapatan lain selain dari hasil usaha dibidang agribisnis. Dengan adanya sumber pendapatan lain tersebut diharapkan dapat *memback-up* pokok yang harus dibayarkan ketika usaha agribisnis mengalami kerugian.

### **b. Lamanya waktu usaha di bidang agribisnis**

Dalam sektor agribisnis, selama ini waktu dianggap menjadi masalah dalam proses produksi karena lamanya menunggu. Mulai dari proses pembibitan hingga pada waktu

memperoleh hasil. Jika dibidang pertanian, umur padi mulai dari benih sampai panen mencapai empat bulan, petani harus menunggu sambil merawat tanamannya hingga sedemikian rupa. Hal ini tidak jauh pula dari bidang peternakan dan perkebunan, semuanya memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil. Maka dari itu, jika berbicara mengenai agribisnis maka hal tersebut tidak lepas dari alam, dan butuh waktu sesuai dengan ciptaan Illahi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moehar Daniel, 2002: 34-48 tentang waktu usaha pertanian.

c. Sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar

Dalam sektor agribisnis ini memerlukan input diantaranya yaitu lahan, bibit, pupuk, pestisida maupun obat-obat lainnya, dan tenaga kerja. Keseluruhan input tersebut memerlukan biaya yang besar dan harga setiap unitnya semakin mahal. Seperti yang dikemukakan oleh Moehar Daniel, 2002: 34-48 bahwa salah satu masalah pertanian adalah biaya usaha. Biaya seringkali menjadi masalah bagi para pelaku agribisnis khususnya petani dalam pengadaan input atau sarana produksi.

d. Orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit

Semakin berkembangnya zaman, sektor agribisnis khususnya pertanian mulai tidak diminati, terlebih persentase tenaga kerja tua lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja usia muda. Sedikitnya orang yang berkecimpung di sektor agribisnis ini juga di dasari oleh semakin sempitnya lahan usaha Di kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah diketahui bahwa sekarang banyak pembangunan-pembangunan tempat pariwisata seperti hotel, mall, tempat wisata, dll.

### 3. Efektivitas Pembiayaan Agribisnis terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta

Pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera menyalurkan dana kepada berbagai sektor di masyarakat, salah satunya yaitu sektor agribisnis. Namun telah diketahui pada bagian sebelumnya bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku agribisnis tidaklah banyak. Berikut Tabel Distribusi Pembiayaan yang menunjukkan presentase pembiayaan agribisnis.

Tabel 1. Presentase Pembiayaan Agribisnis  
BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Per 2017

No	Nama BPRS	Pembiayaan	Pembiayaan Agribisnis	%
1	PT BPRS Bangun Drajat Warga	Rp 66.938.435.692	Rp 101.000.000	0,15
2	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	Rp 27.102.435.216	Rp 701.500.000	2,59
	Total	Rp 94.040.870.908	Rp 802.500.000	0,85

Sumber: PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Distribusi pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul oleh PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri sejahtera dapat dikatakan kurang efektif. Pada tabel distribusi pembiayaan agribisnis menunjukkan bahwa pembiayaan sebesar Rp66.938.435.692 pada PT BPRS Bangun Drajat Warga yang disalurkan kepada masyarakat, hanya 0,15% yang dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis. Tepatnya yaitu hanya sebesar Rp101.000.000 yang dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis. Tidak jauh berbeda dengan PT BPRS Bangun Drajat Warga, dari pembiayaan sebesar Rp27.102.435.216 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, hanya

sebesar 2,59% atau dengan total uang sebesar Rp802.500.000 yang disalurkan kepada pelaku agribisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT BPRS Bangun Drjat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, faktor yang menyebabkan sedikitnya pembiayaan yang dapat disalurkan kepada pelaku agribisnis dikarenakan tidak adanya arahan khusus untuk membiayai sektor agribisnis. Pihak BPRS belum memberikan arahan khusus untuk sektor agribisnis karena memang terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi ketika memberikan pembiayaan pada sektor ini, diantaranya yaitu sektor agribisnis merupakan sektor yang berisiko.

Tabel 2. Omset Nasabah Agribisnis Sebelum dan Sesudah Pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga Periode 2017

Nasabah	Omset		Persentase Kenaikan Omset
	Sebelum	Sesudah	
	Pembiayaan	Pembiayaan	
1	Rp 6.500.000	Rp 42.750.000	84,8
2	Rp 2.500.000	Rp 10.000.000	75
3	Rp 30.000.000	Rp 41.180.000	27,15
4	Rp230.000.000	Rp276.000.000	16,67
5	Rp 60.000.000	Rp 76.000.000	21,05

Sumber: PT BPRS Bangun Drajat Warga

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa PT BPRS Bangun Drajat Warga memiliki 5 nasabah agribisnis pada tahun 2017, namun nasabah tersebut merupakan nasabah yang sudah lama menggunakan produk pembiayaan di BPRS tersebut. Komposisi nasabah dibidang pertanian 4 orang yang telah menjadi nasabah sejak tahun 1990an dan peternakan 1 orang yang mulai menjadi nasabah sejak tahun 2011. Lokasi agribisnis mereka terletak di daerah Bantul dan Kulon Progo. Jenis penggunaan dana mereka yaitu untuk modal kerja dengan akad mudharabah. Plafond yang diajukan juga tidak sebesar pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu kisaran Rp2.000.000 sampai dengan Rp50.000.000 dengan jangka waktu angsuran 4 sampai 20 bulan. Jika dilihat pada omset nasabah, omset nasabah setelah menggunakan pembiayaan mengalami peningkatan. Presentase peningkatan tersebut sebesar 17% hingga 85% dari omset awal sebelum pembiayaan.

Tabel 3. Omset Nasabah Agribisnis Sebelum dan Sesudah Pembiayaan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode 2017

Nasabah	Omset		Persentase Kenaikan Omset
	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan	
1	Rp 6.580.000	Rp108.300.000	29,29
2	Rp 55.000.000	Rp 63.000.000	12,7
3	Rp 27.000.000	Rp 75.000.000	64
4	Rp200.000.000	Rp250.000.000	20
5	Rp108.000.000	Rp184.100.000	41,34
6	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	50
7	Rp150.000.000	Rp340.000.000	55,88
8	Rp126.000.000	Rp150.000.000	16
9	Rp 55.000.000	Rp 66.000.000	16,67
10	Rp 12.000.000	Rp 18.250.000	34,25
11	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	50
12	Rp150.000.000	Rp300.000.000	50
13	Rp150.000.000	Rp300.000.000	50
14	Rp 66.000.000	Rp 75.000.000	12

Sumber: PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa nasabah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang menggunakan pembiayaan agribisnis terdapat 14 orang. Lokasi usaha nasabah juga tidak hanya di Yogyakarta, namun ada pula yang berlokasi di luar Yogyakarta dan di luar Jawa seperti Magelang dan Palembang. Nasabah agribisnis ini biasanya hanya menekuni dan mengembangkan 1 jenis sektor agribisnis diantaranya adalah peternakan, pertanian, atau perkebunan. Nasabah agribisnis menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah, musyarakah, maupun murabahah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Jangka waktu peminjaman dari yang paling singkat yaitu 4 bulan hingga yang paling lama yaitu 60 bulan.

Plafond yang diajukan yaitu dari paling rendah Rp6.000.000 hingga yang paling tinggi yaitu sebesar Rp150.000.000. Plafond yang diajukan oleh peternak yaitu kisaran Rp6.000.000.000 s.d. Rp87.000.000. Kisaran plafond yang diajukan oleh petani sebesar Rp12.000.000 s.d. Rp80.000.000, plafond yang diajukan oleh nasabah perkebunan berkisar Rp50.000.000 s.d. Rp150.000.000. Omset setelah pembiayaan nasabah agribisnis mengalami peningkatan. Omset awal yang paling rendah sebesar Rp2.000.000 meningkat menjadi Rp4.000.000, sedangkan nasabah dengan omset sebelum pembiayaan sebesar Rp200.000.000 meningkat menjadi Rp250.000.000. Presentase peningkatan omset tertinggi sebesar 64% dari sektor pertanian dan terendah pada sektor perkebunan dengan presentase peningkatan sebesar 12%.

Berbeda halnya dengan distribusi pembiayaan dari kedua BPRS yang masih belum maksimal, dampak pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah dapat dikatakan efektif. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa semua nasabah agribisnis pada tahun 2017 mengalami peningkatan omset setelah menggunakan pembiayaan, baik itu nasabah BPRS Bangun Drajat Warga maupun nasabah BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Pembiayaan agribisnis PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dinilai dapat mencapai tujuan pembiayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001), pembiayaan memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut.

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.  
Dalam pelaksanaan bagi hasil, penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi melalui bagi hasil ini, nasabah tidak terbenani untuk membayar bunga yang tinggi, namun bagi hasil yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan oleh nasabah itu sendiri. Sejauh ini, semua nasabah pembiayaan agribisnis di PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak ada yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan, terutama dalam pembayaran bagi hasil. Dari hasil wawancara semua nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga mengatakan bahwa dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini mereka tidak merasa diberatkan. Terlebih terdapat angsuran sistem sebrakan yang dapat digunakan oleh nasabah agribisnis sehingga memudahkan nasabah dalam mengangsur pembiayaan.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional  
Prosedur pembiayaan yang ditetapkan oleh PT BPRS Bangun Drajat warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera menunjukkan kemudahan pengajuan pembiayaan agribisnis oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, semua nasabah mengatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan yang disertai persyaratan administrasi mudah untuk dipenuhi oleh calon nasabah. Hal ini didukung dengan adanya panduan dari AO terkait pengumpulan berkas administrasi.
- 3) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran  
Melalui pembiayaan agribisnis ini, nasabah dapat mengembangkan usahanya. Terlebih nasabah yang dahulunya mempunyai masalah keuangan untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan pembiayaan agribisnis di kedua PT BPRS di Bantul, mereka dapat memenuhi kebutuhan biaya input. Berdasarkan hasil penelitian, omset semua nasabah setelah menggunakan pembiayaan agribisnis mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan yang diberikan terhadap output yang dihasilkan.

## SIMPULAN

1. Prosedur pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, khususnya PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdiri dari 3 tahap yaitu 1) tahap pengajuan pembiayaan, 2) tahap pencairan dana yang dilaksanakan bersamaan dengan akad, 3) tahap pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan agribisnis yang ditetapkan oleh BPRS sudah berjalan dengan baik.
2. PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan kepada sektor agribisnis didasari atas peluang pentingnya sektor agribisnis yang dapat memenuhi kebutuhan pangan suatu daerah, khususnya kebutuhan pangan di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan pembiayaan agribisnis tersebut, kedua BPRS mendapati hambatan-hambatan yaitu 1) sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko, 2) lamanya waktu usaha di bidang agribisnis, 3) sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar, 4) orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit.
3. Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif karena omset semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut mengalami



peningkatan mulai dari 12% hingga 85%. Hal tersebut berbeda halnya dengan distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut yang dinilai kurang efektif karena hanya terdapat 5 nasabah agribisnis atau sebesar 0,15% dari seluruh pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga yang disalurkan, dan hanya terdapat 14 nasabah agribisnis atau sebesar 2,59% dari seluruh pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang disalurkan kepada pelaku agribisnis.

## SARAN

1. Prosedur pembiayaan yang digunakan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera kedepannya perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar nasabah lebih mudah dalam mengajukan pembiayaan dan tepat dalam pengembalian pembiayaan. Terdapat pula beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pihak BPRS pada tahap-tahap prosedur pembiayaan terutama pada tahap pengembalian dana yaitu diperlukan upaya *controlling* nasabah dalam pengembalian pembiayaan, perlu adanya pembinaan keuangan dan pembinaan usaha secara manajerial secara rutin oleh pihak BPRS kepada nasabah agribisnis. Pembinaan tersebut dapat dilakukan selama dua minggu sekali ataupun sebulan sekali. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan pengangsuran akibat adanya masalah usaha yang tidak dapat diselesaikan.
2. Pihak BPRS perlu meningkatkan strategi pembiayaan agribisnis yang dapat meminimalisir ataupun mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. BPRS kedepannya harus meningkatkan strategi penyaluran pembiayaan agribisnis dan mempertahankan konsistensi peningkatan omset nasabah di Kabupaten Bantul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah maupun hasil pertanian nasabah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pembuatan target khusus pembiayaan di beberapa sektor, khususnya sektor agribisnis. Target ini bertujuan untuk mempermudah pihak BPRS untuk mencapai kuantitas maupun kualitas pembiayaan agribisnis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, upaya dalam mempertahankan konsistensi peningkatan omset nasabah agribisnis diperlukan adanya laporan analisis usaha nasabah agribisnis secara periodik, bisa 3, 6, atau 12 bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan finansial nasabah, sebagai alat analisis keefektifan pembiayaan, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi pembiayaan maupun pemasaran di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Azzahrah, Mufida Amalia. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM dan Efektivitas Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM (Studi kasus : Pada BMT X Jakarta)*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Bishop, C.E. dan W.D. Toussaint. 1979. *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Mutiara.
- Bps.go.id
- Buchori, Ahmad, Bambang Himawan, Edi Setijawan, et al. (2004). *Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia*. Jurnal Bank Indonesia.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2009. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Prenhallindo Jakarta.
- Daniel, Moehar. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kharim, Adiwarmarman A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mansoer, Hamdan. 1989. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Mubyarto. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES.
- Sarifuddin, Mohamad. 2017. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BPRS Metro Madani, Kota Metro*. [Tesis]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lamppung.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Sochih, Mohammad. (2008). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity) untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen pada PT BPRS Margirizki, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada PT BPRS Margirizki Bahagia)*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6, 82-95.
- Solihin, Ismail. -. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Steers, Richard M., Gerardo R. Ungson, Richard T. Mowday. 1985. *Managing Effective Organizations*. California: Kent Publishing Company.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Syafar, Muhammad. 2006. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah terhadap Petani Agribisnis Sayuran Pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor (Studi Kasus Petani Sayuran Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Triandaru, Sigit, Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ubaedillah, Ibnu. 2011. *Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)*. [Skripsi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.